

MENGEVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BANK PENGKREDITAN RAKYAT XYZ

Alifia Kusuma Putri¹⁾, Sjarief Hidajat²⁾

20013010059@student.upnjatim.ac.id¹⁾, sjariefhidajat.ak@upnjatim.ac.id²⁾

^{1),2)}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Manajemen aset tetap di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) XYZ merupakan proses penting dalam mendukung efisiensi dan transparansi operasional perbankan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan penghapusan aset tetap, menilai dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai Bank XYZ yang terkait, dengan sampel *purposive* sampling terdiri dari manajemen senior, staf akuntansi dan keuangan, serta karyawan operasional yang berpengalaman. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif dan rekomendasi bermanfaat untuk perbaikan kebijakan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman yang kurang memadai, resistensi internal, kekurangan data yang akurat, dan kurangnya pemantauan adalah beberapa masalah utama yang diidentifikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang meliputi peningkatan sosialisasi dan pelatihan, pengembangan kriteria yang jelas, peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Kata Kunci: Kebijakan Penghapusan Aset Tetap, Transparansi, Akuntabilitas, BPR XYZ

ABSTRACT

Fixed asset management at Bank Perkreditan Rakyat (BPR) XYZ is a crucial process in supporting the efficiency and transparency of banking operations. This study aims to identify the strengths and weaknesses of the fixed asset disposal policy, assess its impact on transparency and accountability, and provide improvement recommendations. The research method used is descriptive qualitative, involving in-depth interviews, observation, and document analysis. The research population includes all relevant employees of Bank XYZ, with a purposive sample consisting of senior management, accounting and finance staff, and experienced operational employees. This study is expected to provide a comprehensive overview and valuable recommendations for policy improvement. The main findings indicate that while the policy is designed to enhance transparency and accountability, its implementation still faces various challenges. Inadequate understanding, internal resistance, lack of accurate data, and lack of monitoring are some of the main problems identified. To address these issues,

improvement measures are needed, including increasing socialization and training, developing clear criteria, improving recording and reporting systems, simplifying procedures, and strengthening monitoring and evaluation mechanisms.

Keywords: *Fixed Asset Disposal Policy, Transparency, Accountability, BPR XYZ*

PENDAHULUAN

Bank Mandiri baru-baru ini menggelar lelang besar-besaran agunan kredit macet sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset. Acara ini, yang dinamakan Gema Auction 22-2-22, dilakukan secara elektronik dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Lelang tersebut mencakup 834 agunan aset dengan jumlah limit lebih dari Rp 1 triliun. Inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas aset dan mendukung pengembangan bisnis Bank Mandiri secara berkelanjutan, serta memastikan proses lelang dilakukan dengan efisien dan akuntabel (KOMPAS.com). Perekonomian Indonesia ini juga didukung oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama melalui penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat mikro dan kecil (Yusi, 2019). BPR memiliki berbagai aset tetap yang merupakan bagian penting dari neraca keuangan mereka selama operasinya. Aset tetap ini meliputi gedung, peralatan kantor, kendaraan operasional, dan lain-lain, yang semuanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Di lingkungan BPR pengelolaan aset tetap sangat memengaruhi laporan keuangan dan kondisi operasional bank. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan BPR, kebutuhan untuk memastikan bahwa aset tetap yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi atau teknis yang optimal dapat dihapus secara tepat menjadi semakin penting, agar laporan keuangannya tetap akurat dan dapat diandalkan (Miskak, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep kunci yang mendasari tata kelola yang baik dalam setiap organisasi, terutama di sektor keuangan (Tasman & Ulfanora, 2024). Dalam industri perbankan, kedua aspek ini menjadi semakin penting mengingat peran bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dan memberikan berbagai layanan keuangan. BPR XYZ, sebagai salah satu pemain penting dalam sektor keuangan mikro di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional dan pelaporan keuangannya memenuhi standar tertinggi transparansi dan akuntabilitas. Salah satu area yang sering menjadi sorotan dalam pelaporan keuangan adalah pengelolaan aset tetap, khususnya terkait dengan prosedur penghapusan aset tetap.

Penghapusan aset tetap adalah salah satu proses penting dalam pengelolaan aset tetap di BPR (Pangkajene, 2020) . Proses ini melibatkan langkah-langkah strategis untuk menyingkirkan aset tetap yang tidak produktif atau tidak lagi memenuhi kebutuhan bank. Proses pertama adalah menemukan aset tetap yang akan dihapus, mungkin karena kerusakan, usia, atau perubahan kebutuhan bisnis. Setelah itu, nilai aset dinilai dengan mempertimbangkan pilihan seperti menjual, membuang, atau menyumbangkan. Selain itu, dalam proses penghapusan aset, harus dipenuhi peraturan dan peraturan terkait, seperti melaporkan kepada otoritas yang berwenang dan memenuhi kewajiban pajak.

Tabel 1.1 Jenis Aset Tetap dan Masa Manfaatnya di BPR XYZ

Jenis aset tetap	Contoh	Masa manfaat (Tahun)
Tanah	Lahan Kantor cabang	Tidak terbatas
Bangunan	Gedung kantor	20-40
Peralatan kantor	Komputer, printer	3-5
Kendaraan operasional	Mobil operasional	5-10
Perabotan kantor	Meja, Kursi	5-10

Sumber : Pedoman akuntansi BPR XYZ

Aset tetap, yang mencakup tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan, merupakan komponen signifikan dalam laporan keuangan bank. Aset-aset ini digunakan dalam operasional sehari-hari dan memiliki masa manfaat yang panjang. Seiring berjalannya waktu, aset tetap akan mengalami penurunan nilai atau menjadi tidak berguna lagi, sehingga perlu dihapuskan dari laporan keuangan. Proses penghapusan aset tetap ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar nilai aset yang tersisa dapat mencerminkan kondisi sebenarnya. Jika tidak dilakukan dengan benar, informasi keuangan yang disajikan dapat menjadi tidak akurat, mengurangi tingkat transparansi, dan mengikis kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan tentang aset tetap yang dimiliki dan cara pengelolaannya merupakan salah satu isu utama yang dihadapi. Banyak BPR mengalami kesulitan dalam menjaga catatan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik terkait aset tetap seperti bangunan, peralatan, dan kendaraan (Kusmayadi, 2019). Kelemahan dalam transparansi ini bisa mengakibatkan ketidakjelasan dalam menetapkan nilai aset, estimasi umur manfaatnya,

serta pengambilan keputusan mengenai penghapusan atau penggantian aset yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, kurangnya tingkat akuntabilitas juga menjadi permasalahan serius, karena tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, risiko penyalahgunaan atau pembiayaan yang tidak sah terhadap aset tetap dapat meningkat. Situasi ini membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar standar akuntansi yang berlaku. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi BPR bisa tergerus, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi pertumbuhan bisnis serta stabilitas keuangan lembaga tersebut. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen aset tetap menjadi suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan dan kepercayaan dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat.

Perlunya mengevaluasi kebijakan penghapusan aset tetap di BPR sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional dan kesehatan keuangan bank. Evaluasi berkala memungkinkan BPR untuk meninjau dan memperbarui kebijakan penghapusan aset tetap sesuai dengan perubahan dalam persyaratan bisnis, regulasi, dan praktik industri (Budiyah et al., 2024). Dengan melakukan evaluasi yang tepat, BPR dapat memastikan bahwa kebijakan penghapusan aset tetap mereka sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, termasuk pengelolaan risiko, optimalisasi nilai, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Selain itu, evaluasi membantu BPR memastikan bahwa kebijakan penghapusan aset tetap mereka sesuai dengan masalah seperti proses yang tidak efisien, kurangnya transparansi, atau kurangnya pemahaman tentang nilai aktual aset

Dalam konteks BPR XYZ, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap sangat penting karena berpengaruh langsung pada kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan penghapusan aset tetap yang jelas dan transparan akan membantu memastikan bahwa nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan mencerminkan nilai wajar, serta setiap penghapusan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor, nasabah, dan otoritas pengawas terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh BPR XYZ.

Kebijakan yang baik dalam prosedur penghapusan aset tetap tidak hanya berdampak pada akurasi laporan keuangan, tetapi juga pada efisiensi operasional (Hidayatin et al., 2022). Dengan memiliki kebijakan dan prosedur yang terstruktur, BPR XYZ dapat mengelola aset tetapnya dengan lebih efektif, menghindari kerugian akibat aset yang tidak digunakan, dan

memaksimalkan nilai dari aset-aset yang ada. Selain itu, transparansi dalam proses penghapusan aset tetap juga akan meningkatkan akuntabilitas manajemen, karena setiap keputusan yang diambil terkait dengan aset tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur penghapusan aset tetap sering kali menjadi area yang rawan penyalahgunaan dan ketidakjelasan. Ketidaktepatan dalam kebijakan penghapusan aset dapat membuka celah bagi tindakan yang tidak transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya merugikan institusi dan para pemangku kepentingannya. Di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang, BPR XYZ sebagai salah satu entitas keuangan yang melayani masyarakat, harus mampu mengimplementasikan kebijakan penghapusan aset tetap yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap proses penghapusan aset dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi tersebut.

Penelitian mengenai pengelolaan dan penghapusan aset tetap telah banyak dilakukan, dengan berbagai temuan yang memberikan wawasan penting dalam pengembangan kebijakan di sektor keuangan. Misalnya, Studi [1] oleh (Yanti et al., 2019) meneliti BPR Delta Singosari dan menemukan bahwa kebijakan penghapusan aset tetap belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terutama dalam hal dokumentasi dan persetujuan penghapusan. Untuk mengatasi masalah kebijakan penghapusan aset tetap yang belum terlaksana dengan baik di BPR Delta Singosari, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan prosedur standar operasional (SOP) yang jelas untuk penghapusan aset tetap sangat penting, termasuk langkah-langkah untuk dokumentasi dan persetujuan (Reza, Auliya & Venny, 2023). Kedua, pelatihan rutin bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan aset akan membantu mereka memahami pentingnya dokumentasi yang baik dan proses persetujuan yang tepat (Hartati, 2022). Selain itu, adopsi sistem manajemen aset terintegrasi dapat mempermudah pelacakan status aset dan mengotomatiskan proses dokumentasi. Audit internal berkala juga perlu dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, sementara penguatan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi individu atau tim. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan serta menerapkan mekanisme monitoring dan pelaporan akan memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan aset tetap (Firmansyah et al., 2020). Dengan langkah-langkah ini, BPR Delta Singosari diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penghapusan aset tetap dan memperbaiki proses yang ada.

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, terlihat jelas bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan memperkuat kebijakan penghapusan aset tetap di BPR, terutama dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Artikel yang berjudul "MENGEVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BANK PENGKREDITAN RAKYAT XYZ" bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan penghapusan aset tetap yang diterapkan di BPR XYZ saat ini dapat ditingkatkan. Dengan latar belakang pentingnya manajemen aset tetap dalam memastikan operasional yang efisien dan transparan, artikel ini akan mengevaluasi kebijakan yang ada, mengidentifikasi kekurangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Konsep akuntabilitas dan transparansi dalam konteks BPR sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan bertanggung jawab kepada berbagai pihak terkait. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban sebuah lembaga untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya, sementara transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kegiatan dan kondisi lembaga tersebut kepada publik (Rosidah et al., 2023).

Pentingnya akuntabilitas dalam BPR tercermin dalam berbagai aspek operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat dengan skala yang lebih kecil dibanding bank komersial, BPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dana nasabah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat. Ini termasuk memastikan bahwa dana yang diterima dari nasabah digunakan untuk tujuan yang telah disepakati dan dilindungi dari potensi penyalahgunaan.

Transparansi dalam konteks BPR mengharuskan lembaga ini untuk secara terbuka menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional, serta risiko yang dihadapi. Dengan adanya transparansi yang memadai, para pemangku kepentingan seperti nasabah, regulator, dan investor dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kesehatan keuangan dan stabilitas BPR. Hal ini membantu dalam membangun kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan lembaga tersebut dalam jangka panjang.

Implementasi konsep akuntabilitas dan transparansi dalam BPR melibatkan beberapa langkah penting. Lembaga harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pengelolaan risiko, pemeriksaan internal, dan pelaporan keuangan. Ini memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan dengan mematuhi standar yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fitriana et al., 2022),(Indriani, 2022),(Supriyanto et al., 2022) yang telah menyimpulkan bahwa pentingnya audit eksternal secara teratur oleh pihak independen tidak dapat dilebih-lebihkan, audit ini membantu mengevaluasi kepatuhan BPR terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta mengidentifikasi area-area di mana peningkatan dapat dilakukan, hasil audit juga penting dalam menyediakan keyakinan kepada nasabah dan pihak lain bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh BPR adalah akurat dan dapat dipercaya.

Mengembangkan budaya korporat yang mendorong integritas dan transparansi di semua tingkatan organisasi adalah langkah krusial. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan staf dalam hal etika kerja, kepatuhan peraturan, serta pentingnya berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada semua pemangku kepentingan. Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika pasar yang terus berubah, BPR juga harus adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Ini membutuhkan investasi dalam sistem informasi yang canggih untuk memperbaiki pelaporan dan pemantauan risiko secara real-time, serta untuk meningkatkan aksesibilitas informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Konsep akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan jangka panjang BPR. Dengan memastikan bahwa lembaga ini menjalankan tugasnya dengan integritas dan keterbukaan, BPR tidak hanya memenuhi harapan nasabah dan regulator, tetapi juga membangun fondasi yang stabil untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan kontribusi yang positif terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap dijelaskan sebagai proses di mana pengakuan aset harus dihentikan ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (Safi'i et al., 2023). Prosedur ini melibatkan pengakuan keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset tetap, yang dihitung sebagai selisih antara nilai buku aset dan nilai wajar dari imbalan yang diterima (jika ada).

Kebijakan penghapusan aset tetap

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2018 mengenai kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap menggambarkan bahwa kebijakan ini adalah kumpulan aturan dan prosedur yang dibuat oleh pimpinan instansi untuk mengatur bagaimana aset tetap dikeluarkan dan dipindahtangankan dari entitas, baik itu badan usaha milik negara maupun entitas lainnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penghapusan aset tetap dilakukan dengan terstruktur dan sistematis, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar aset yang dihapuskan memang tidak lagi memberikan manfaat ekonomi bagi entitas, dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan manajer keuangan, staf akuntansi, dan auditor internal BPR XYZ, sementara data sekunder diperoleh dari artikel-artikel penelitian sebelumnya, laporan keuangan, kebijakan internal tentang pengelolaan aset tetap, dan catatan audit internal. dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang diinvestigasi. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen puncak dan staf keuangan, terungkap bahwa pemahaman tentang kebijakan penghapusan aset tetap di BPR XYZ sangat bervariasi. Manajemen puncak, yang terlibat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan, umumnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan alasan di balik kebijakan tersebut. Mereka menyadari bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa aset yang tidak lagi memberikan nilai ekonomis dihapus dari pembukuan, yang pada akhirnya akan meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan bank.

Selain itu, manajemen puncak memahami bahwa dengan menghapus aset yang tidak produktif, bank dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan fokus pada aset yang memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja keuangan. Mereka melihat kebijakan ini

sebagai langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Namun, wawancara dengan staf keuangan dan operasional menunjukkan gambaran yang berbeda. Di tingkat operasional, pemahaman tentang kebijakan penghapusan aset tetap tidak merata. Beberapa staf keuangan mungkin memahami prosedur secara umum, tetapi tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang detail teknis dan alasan di balik kebijakan tersebut. Mereka sering kali tahu bahwa aset yang tidak produktif perlu dihapus, tetapi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kapan tepatnya aset harus dihapus atau bagaimana proses evaluasi dan persetujuan seharusnya dilakukan.

Kesenjangan pemahaman ini mencerminkan adanya masalah komunikasi antara manajemen puncak dan staf operasional. Sering kali, kebijakan yang dirumuskan di tingkat manajemen tidak disosialisasikan dengan baik kepada staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Staf operasional mungkin merasa kebingungan tentang kapan dan bagaimana kebijakan ini harus diterapkan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam di tingkat operasional dapat menyebabkan penilaian yang tidak konsisten terhadap aset yang harus dihapus. Staf mungkin ragu untuk mengusulkan penghapusan aset karena takut akan konsekuensi administratif atau karena tidak memiliki informasi yang cukup tentang kondisi aset. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam proses penghapusan aset dan mengurangi efektivitas kebijakan.

Untuk mengatasi kesenjangan pemahaman ini, diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif. Manajemen puncak harus memastikan bahwa semua staf yang terlibat dalam proses penghapusan aset mendapatkan pemahaman yang memadai tentang kebijakan, prosedur, dan alasan di baliknya. Ini dapat dilakukan melalui sesi pelatihan, *workshop*, dan komunikasi rutin untuk memastikan bahwa staf operasional merasa didukung dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dengan benar. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penghapusan aset tetap dapat meningkat, dan tujuan transparansi serta akuntabilitas dapat tercapai dengan lebih baik.

Proses Penghapusan Aset Tetap

Proses penghapusan aset tetap di BPR XYZ menunjukkan langkah-langkah dalam prosedur penghapusan aset tetap dan tingkat kepatuhan terhadap masing-masing langkah

Tabel 4.1 Prosedur Penghapusan Aset dan Tingkat Kepatuhan

Langkah Prosedur	Deskripsi	Tingkat Kepatuhan (%)
Identifikasi Aset	Mengidentifikasi aset yang tidak produktif	70
Evaluasi Nilai Sisa	Menilai nilai sisa aset	60
Persetujuan Manajemen	Mendapatkan persetujuan dari manajemen	90
Penghapusan dari Pembukuan	Menghapus aset dari pembukuan	80

Wawancara mengungkapkan bahwa meskipun prosedur ini terdokumentasi dengan baik, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah identifikasi aset yang sudah tidak lagi memberikan manfaat ekonomi tingkat kepatuhan pada tahap ini sebesar 70% menunjukkan bahwa masih ada aset-aset yang mungkin belum teridentifikasi secara efektif sebagai tidak produktif. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya kriteria yang jelas dan terukur, atau kurangnya pemahaman di tingkat operasional mengenai bagaimana mengidentifikasi aset yang harus dihapus. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka sering kali ragu untuk mengusulkan penghapusan aset karena khawatir akan konsekuensi administratif atau kekurangan informasi tentang kondisi aset tersebut. Selain itu, proses evaluasi nilai sisa aset juga dianggap kurang transparan karena sering kali didasarkan pada penilaian subjektif tanpa standar yang jelas, Tingkat kepatuhan yang rendah pada tahap ini 60% menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam menilai nilai sisa aset dengan akurat. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan mungkin termasuk kurangnya data yang akurat tentang kondisi aset, serta penilaian subjektif yang tidak didukung oleh standar yang jelas.

Transparansi dalam Penghapusan Aset

Transparansi merupakan salah satu aspek penting yang ingin dicapai melalui kebijakan penghapusan aset tetap. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa transparansi dalam proses ini masih perlu ditingkatkan. Beberapa responden menyebutkan bahwa laporan penghapusan aset sering kali tidak tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan, seperti staf operasional dan auditor internal. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap proses tersebut dan menimbulkan kesan bahwa ada ketidakjelasan dalam penentuan aset yang dihapus.

Selain itu, dokumentasi yang mendukung keputusan penghapusan aset sering kali tidak lengkap atau tidak mudah diakses. Hal ini menghambat upaya untuk melakukan audit dan verifikasi independen, yang merupakan elemen penting dalam memastikan transparansi.

Akuntabilitas dalam Proses Penghapusan Aset

Akuntabilitas dalam proses penghapusan aset tetap juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan auditor internal dan manajemen puncak, ditemukan bahwa akuntabilitas dalam proses ini masih perlu ditingkatkan. Salah satu isu utama adalah kurangnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap aset yang telah dihapus.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa setelah aset dihapus, jarang ada tinjauan atau audit lebih lanjut untuk memastikan bahwa penghapusan tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Hal ini menimbulkan risiko bahwa aset yang masih memiliki nilai ekonomi bisa saja dihapus tanpa justifikasi yang memadai, atau sebaliknya, aset yang seharusnya dihapus tetap tercatat dalam pembukuan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan penghapusan aset tetap di BPR XYZ menghadapi beberapa tantangan signifikan. Tantangan utama yang diidentifikasi melalui wawancara adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan ini. Staf operasional sering kali merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menerapkan prosedur dengan benar. Selain itu, kurangnya standar yang jelas dan panduan teknis juga menjadi kendala dalam pelaksanaan yang konsisten.

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa responden menyatakan bahwa ada perlawanan internal terhadap kebijakan ini karena dianggap menambah beban kerja administratif tanpa memberikan manfaat yang jelas. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan

yang lebih mendekat dalam implementasi kebijakan agar semua pihak memahami dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.

Analisis Dampak Kebijakan

Dampak terhadap Transparansi

Kebijakan penghapusan aset tetap di BPR XYZ memiliki dampak positif dan negatif terhadap transparansi. Di satu sisi, kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dengan memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang tercatat dalam pembukuan. Namun, pelaksanaan yang kurang optimal mengurangi dampak positif ini.

Dari wawancara, diketahui bahwa keterbukaan informasi mengenai proses penghapusan aset masih perlu ditingkatkan. Laporan dan dokumentasi yang tidak lengkap serta akses terbatas terhadap informasi membuat beberapa pihak meragukan kejujuran dan keadilan dalam proses ini. Oleh karena itu, untuk benar-benar meningkatkan transparansi, diperlukan langkah-langkah tambahan seperti penyempurnaan dokumentasi, peningkatan akses informasi, dan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat.

Dampak terhadap Akuntabilitas

Kebijakan penghapusan aset tetap juga berpengaruh terhadap akuntabilitas di BPR XYZ. Kebijakan ini menuntut adanya tanggung jawab yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penghapusan aset. Namun, akuntabilitas yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif.

Wawancara mengungkapkan bahwa meskipun prosedur penghapusan aset sudah ada, pelaksanaan dan pemantauan sering kali tidak konsisten. Kurangnya audit berkala dan evaluasi terhadap aset yang dihapus menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan atau kesalahan dalam proses ini. Untuk memperbaiki akuntabilitas, BPR XYZ perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan bahwa semua tahap dalam proses penghapusan aset dilakukan dengan standar yang tinggi dan transparan.

Identifikasi Aset yang Tidak Produktif

Identifikasi aset yang tidak lagi produktif merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penghapusan aset. Berdasarkan wawancara, proses ini di BPR XYZ sering kali menemui

kesulitan karena tidak adanya kriteria yang jelas dan standar yang seragam. Responden mengindikasikan bahwa sering kali keputusan untuk menghapus aset didasarkan pada penilaian subjektif tanpa data pendukung yang memadai.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan kriteria yang objektif dan dapat diukur untuk mengidentifikasi aset yang tidak lagi produktif. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan bimbingan bagi staf untuk melakukan evaluasi yang akurat. Dengan demikian, proses ini bisa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur Evaluasi dan Penghapusan Aset

Prosedur evaluasi dan penghapusan aset di BPR XYZ harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua langkah telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada prosedur yang terdokumentasi, pelaksanaannya sering kali tidak seragam.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa proses evaluasi sering kali terhambat oleh kurangnya data yang akurat dan lengkap mengenai kondisi aset. Hal ini menimbulkan risiko bahwa aset yang masih layak pakai bisa dihapus secara prematur, atau sebaliknya, aset yang seharusnya dihapus tetap tercatat. Untuk mengatasi ini, diperlukan peningkatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan kondisi aset, serta audit berkala untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dijalankan dengan benar.

Dampak Kebijakan terhadap Efisiensi Operasional

Selain transparansi dan akuntabilitas, kebijakan penghapusan aset tetap juga berdampak pada efisiensi operasional BPR XYZ. Dengan menghapus aset yang tidak lagi produktif, diharapkan BPR XYZ bisa fokus pada penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Namun, wawancara mengindikasikan bahwa manfaat ini belum sepenuhnya terealisasi.

Responden menyatakan bahwa proses penghapusan aset sering kali memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Selain itu, kurangnya pemahaman dan panduan teknis membuat proses ini berjalan lambat dan tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan penyederhanaan prosedur dan peningkatan kapabilitas staf melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Tantangan

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan berbagai pihak terkait di BPR XYZ, teridentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan aset tetap:

Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi

Staf operasional sering kali menghadapi tantangan dalam memahami secara mendalam kebijakan dan prosedur penghapusan aset tetap. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan, karena tidak semua staf memahami secara detail kapan dan bagaimana aset tetap harus dihapus dari pembukuan. Komunikasi dan sosialisasi yang kurang memadai dari manajemen puncak menjadi salah satu penyebab utama dari masalah ini.

Resistensi Terhadap Perubahan

Di tingkat operasional, terdapat resistensi terhadap kebijakan penghapusan aset tetap karena dianggap menambah beban kerja tanpa memberikan manfaat yang langsung terlihat atau jelas. Beberapa staf mungkin merasa bahwa proses penghapusan ini hanya menambah pekerjaan administratif tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mereka secara langsung.

Kekurangan Data yang Akurat

Proses evaluasi dan penghapusan aset tetap sering kali terhambat oleh kekurangan data yang akurat dan lengkap mengenai kondisi aset. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu aset telah mencapai akhir umurnya atau tidak lagi memberikan nilai ekonomis yang layak.

Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap aset yang telah dihapus dari pembukuan masih belum optimal. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan dalam proses penghapusan serta potensi penyalahgunaan atau kekeliruan dalam manajemen aset tetap secara keseluruhan.

Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan aset tetap, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh BPR XYZ:

Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan

BPR XYZ sebaiknya mengadakan program sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada staf operasional tentang kebijakan dan prosedur penghapusan aset tetap. Pelatihan ini harus merinci tujuan dari kebijakan tersebut, prosedur yang harus diikuti, serta implikasi bagi keuangan dan operasional BPR. Dengan demikian, diharapkan semua staf dapat memahami pentingnya kebijakan ini dan cara terbaik untuk menerapkannya dalam tugas sehari-hari mereka.

Pengembangan Kriteria yang Jelas

Menetapkan kriteria yang jelas dan terukur untuk mengidentifikasi aset yang tidak lagi produktif atau yang telah mencapai akhir umur operasionalnya. Kriteria ini harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam proses evaluasi aset tetap di BPR XYZ. Hal ini akan membantu mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan terkait penghapusan aset.

Peningkatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan kondisi aset tetap untuk menyediakan data yang lebih akurat dan lengkap. Sistem ini harus mampu memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan tentang kondisi aset, termasuk informasi tentang nilai buku, umur ekonomis yang tersisa, dan kondisi fisik aset.

Penyederhanaan Prosedur

Menyederhanakan prosedur penghapusan aset tetap untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban administratif yang dirasakan oleh staf. Prosedur yang lebih sederhana dan langsung akan mempermudah staf untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan tanpa mengorbankan kualitas atau keakuratan proses.

Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap aset yang telah dihapus dari pembukuan. Auditor internal harus terlibat lebih aktif dalam memeriksa konsistensi dan kepatuhan terhadap kebijakan penghapusan aset tetap, serta melakukan audit rutin untuk menilai efektivitas dari proses tersebut. Hal ini akan membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas di dalam organisasi.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan BPR XYZ dapat mengatasi tantangan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan aset tetap, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen aset tetap, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas BPR XYZ di sektor perbankan Indonesia

KESIMPULAN

Pengelolaan aset tetap di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) XYZ merupakan proses yang penting dalam mendukung efisiensi dan transparansi operasional perbankan. Kebijakan penghapusan aset tetap menjadi bagian krusial dalam upaya untuk memastikan bahwa laporan keuangan BPR mencerminkan kondisi aset yang sesungguhnya dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Bab ini telah membahas hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan prosedur penghapusan aset tetap di BPR XYZ. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman yang kurang memadai, resistensi internal, kekurangan data yang akurat, dan kurangnya pemantauan adalah beberapa masalah utama yang diidentifikasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang meliputi peningkatan sosialisasi dan pelatihan, pengembangan kriteria yang jelas, peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan BPR XYZ dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghapusan aset tetap, serta mencapai efisiensi operasional yang lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi BPR XYZ dalam upaya meningkatkan manajemen aset tetap mereka dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap praktik akuntansi dan manajemen yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyah, F., Enjelina Banjarnahor, R., & Ubaidillah, M. (2024). Prosedur Stock Opname Dalam Audit Persediaan Pada Pt Cgi Oleh Kap Suharli, Sugiharto Dan Rekan. *Ekonomica*

-
- Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(2), 287–296.
<https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.1088>
- Firmansyah, A., Setiawan, T. A., & Fathurahman, F. (2020). Nilai Perusahaan: Kebijakan Utang, Good Corporate Governance, Cash Holding. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 237. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.568>
- Fitriana, Rahmat, agus, S., Nanang, R., & Sudharmawan. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316.
<https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Hartati, S. (2022). Evaluasi Kinerja Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan Konsep Manajemen Mutu, Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 13433.
- Hidayatin, D. A., Puspita Sari, R., & Sari, N. (2022). Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah di Tengah Pandemi Covid19. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 55–67. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p55-67>
- Indriani, J. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Komite Audit Terhadap NilaiPerusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Basic Materials Tahun 2017-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol IX, No. 2(2)*.
- Kusmayadi, D. (2019). Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dengan Faktor Camel. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.37058/jak.v12i1.299>
- Miskak, S. (2020). *Kegagalan Analisis Laporan Keuangan Dalam Memprediksi Kebangkrutan BPR/BPRS di Indonesia*.
- Pangkajene, B. (2020). Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Bagi Pembangunan Daerah. *6 April 2020*, 1–24. <https://www.jogloabang.com/ekbis/kebijakan-akuntansi-aset#:~:text=PENGUKURAN,nilai wajar pada saat perolehan.>
- Reza, Auliya, R., & Venny, D. (2023). Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Logistik Pada Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Barat. *International Journal of Technology*, 47(1), 100950.
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.t>

rd.2021.102816%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.eastsj.20

- Rosidah, I., Gunardi, Priatna, K., & Royke, Bahagia, R. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Supriyanto, S., Learns Tay, M., Chairika, S., & Maria Theresia Barahama, S. (2022). Manajemen Risiko Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 223–232. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.535>
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2024). Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 351–362. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933>
- Yanti, T., Wijaya, W., & Sari, A. R. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Etap No 15 (Studi pada PT BPR Delta Singosari). *Jurnal Riset Mahasiswa*, 15(15), 1–13.
- Yusi, M. S. (2019). Bank Perkreditan Rakyat : Dan Pembiayaan Usaha Kecil. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(3), 464–474.
- Safi'i, M., Ibnu, Fahriani, Z., & Firda. (2023). PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAK NO. 16 PADA PT SELECTA. *International Journal of Technology*, 47(1), 100950. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002%0A0>